

Moralitas Pancasila dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarga negaraan untuk Penguatan Nilai Moral dalam Konteks Globalisasi

Abdul Hadi

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, abd.hadhy@radenfatah.ac.id

Abstrak

Globalisasi jelas berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga. Konsep kewarga negaraan global tentu akan menjadi masalah yang berkembang untuk semua warga dunia. Warga dunia global menuntut agar setiap warga negara memiliki peran yang sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga dunia. Pengembangan kewarga negaraan sebagai hasil dari pembangunan global jelas akan menjadi tuntutan bersama untuk kesetaraan di antara warga global di mana kebebasan dan kesetaraan adalah fokus utama. Konsep kewarga negaraan global menjadi prioritas penting bagi negara-negara di seluruh dunia. Artikel ini akan mengeksplorasi fungsi perspektif Pendidikan Kewarga negaraan Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai moral bangsa.

Kata Kunci: Pancasila, Pendidikan Kewarga negaraan, kurikulum

Abstract

Globalization clearly impacts various aspects of citizens' lives. The concept of global citizenship will certainly be a growing issue for all citizens of the world. Global citizens demand that every citizen have the same role in carrying out their rights and obligations as a global citizen. The development of citizenship as a result of global development will clearly be a joint demand for equality among global citizens where freedom and equality are the main focus. The concept of global citizenship becomes an important priority for countries around the world. This article will explore the function of Indonesian Citizenship Education perspective to strengthen the nation's moral values.

Keywords: Pancasila, Citizenship Education, curriculum

Pendahuluan

Pendidikan Kewarga negaran dalam perspektif global ditujukan dalam rangka mengembangkan etos Kewarga negaraan yang demokratis, yakni karakter warga negara yang mampu dan berkemauan aktif untuk mempengaruhi berbagai fungsi lembaga-lembaga negara. Upaya dalam pengembangan karakter penting seperti kejujuran, integritas, dan tanggungjawab, hal ini bermanfaat bagi proses untuk menjadi warga negara yang baik. Berkaitan dengan itu, PPKn dirancang bagi pengembangan baik dalam pemahaman teknis tentang perundang-undangan serta jalannya pemerintahan disertai kemauan untuk peduli dan membantu terhadap sesama. Terhadap mahasiswa secara praktis dilatih kemampuan menganalisis terhadap akar penyebab masalah ketidakadilan sosial, ekonomi, serta politik sebagai sarana utama penguatan demokrasi.

Perubahan yang terjadi di dunia saat ini sangatlah cepat, baik dari aspek teknologi, pendidikan, politik, hukum, maupaun ekonomi sebagai akibat perubahan tatanan dunia. Di lain sisi tatanan baru

yang menjadi alternatif untuk menciptakan sistem global yang lebih baik belum terbentuk. Seperti halnya dampak yang disebabkan oleh globalisasi. Hal itu akan berakibatkan pada lemahnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Kelemahan itu akan menimbulkan krisis moneter yang berdampak dan akan terasa dalam kehidupan sehari-hari, serta juga akan mempengaruhi karakter moral dan sikap perilaku manusia diberbagai belahan dunia seperti halnya negara berkembang yakni Indonesia¹.

Bersamaan dengan perkembangan teknologi dan informasi mendorong masyarakat dunia semakin instan dan pragmatis yang secara perlahan membentuk suatu karakter budaya yang makin sulit dihilangkan. Pengaruh globalisasi akan berdampak secara luas bagi perkembangan warga negara secara global baik pada aspek nilai, keyakinan, norma, perilaku, bahkan aspek ekonomi dan perdagangan warga negara². Krisis yang dialami oleh suatu negara jelas berdampak pada generasi muda. Syaifudin dan Satmoko³ menyampaikan bahwa “Generasi muda tentu akan menjadi generasi penerus bangsa untuk memimpin dan membawa perubahan bangsanya ke arah yang lebih baik”. Perkembangan globalisasi yang berdampak terhadap perkembangan warga negara global sudah barang tentu harus diselesaikan oleh peraturan pemerintah maupun sistem pendidikan yang dijalankan untuk mempersiapkan warga negara global yang profesional dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan di negara Indonesia pada kondisi menghadapi berbagai masalah dan cukup besar terkait dengan tantangan globalisasi yang makin luas di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalamnya dunia pendidikan⁴. Untuk itu diperlukan suatu rekonstruksi pada dunia pendidikan guna menyiapkan calon warga negara global. Ini merupakan bentuk pengembangan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berjalan secara global dalam bentuk pengembangan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban secara global. Pembentukan warga global jelas memerlukan proses yang berkesinambungan pada setiap jenjang pendidikan. Jelas hal ini mesti dimulai sejak jenjang pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah bahkan juga hingga pada perguruan tinggi.

Salah satu bentuk pengembangan materi kewarga negaraan perspektif global dapat diajarkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarga negaraan. Materi Pendidikan Kewarga negaraan mempunyai tujuan: 1) Menampilkan karakter yang menampakkan sisi penghayatan, pemahaman, pengamalan nilai-nilai serta moral Pancasila secara personal maupun sosial; 2) Mempunyai komitmen konstitusional dengan ditopang sikap positif dan pemahaman yang utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Berpikir kritis, rasional, kreatif serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika,

¹ Syahril Syarbaini, “Membangun Karakter Dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan,” *Yogyakarta: Graha Ilmu* (2006).

² James A Banks, “Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age,” *Journal of Education* 194, no. 3 (2014): 1–12.

³ Muhammad Syaifudin and Agus Satmoko Adi, “KONTRIBUSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) DALAM PEMBENTUKAN PERILAKU SISWA SMA NEGERI 19 SURABAYA,” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2014): 670–684.

⁴ Sutrisno Asyafiq, “Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen Di Sekolah Menengah Atas,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (October 31, 2017): 166, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/15664>.

serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 4) Berpartisipasi aktif, cerdas, bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, warga bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup secara sosial dalam berbagai tatanan sosial Budaya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Ideologi Pancasila, yang didalamnya terdapat nilai dasar berperikemanusiaan dan berperikeadilan yang menjadi dasar konsep warga global. Hal itu tentu sebagaimana yang tercantu dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang dilaksanakan guna membentuk warga negara yang aktif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara yang baik. Terkait dengan itu Cogan⁵ menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan *“education for citizenship is the large overarching concept here while civic education is but one part, albeit a very important part, of one’s development as citizen”* Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran penting untuk membentuk watak dan karakter warga negara supaya mampu bersaing di zaman global. Pendidikan kewarganegaraan ditujukan guna menjadi pengembang utama untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional supaya siap berpartisipasi menjadi warga negara global.

Secara umum masing-masing negara memiliki perbedaan dalam mengembangkan dan menjalankan tugas sebagai warga negara di masing-masing negara. Warga negara memiliki tugas serta tanggungjawab untuk mampu menjalankan tugas sebagai warga negara dengan baik. Namun demikian peran warga negara telah mengalami pergeseran secara mendasar dengan adanya perkembangan sistem globalisasi di setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu perlu disiapkan generasi warga negara yang mempunyai kesiapan menghadapi pergeseran tatanan kehidupan bernegara. Dengan demikian pendidikan dianggap menjadi lembaga yang penting untuk memberikan pemahaman konsep-konsep warga negara global melalui pendidikan kewarganegaraan di dalam kelas maupun di luar kelas.

Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Global

Melalui konsep Pendidikan Kewarganegaraan global diharapkan warga negara mampu belajar secara luas tentang peran warga negara dunia untuk saling bekerjasama dan membangun kehidupan dunia bersama-sama dalam menyelesaikan berbagai konflik, isu, dan permasalahan lingkungan atau perubahan iklim yang mengancam dunia. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berwawasan global sudah semestinya diajarkan langsung untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah bahkan juga perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan global adalah suatu bentuk penanaman tentang peran generasi muda agar mempunyai wawasan global sebagai upaya membangun kehidupan manusia yang berkeadaban. Pendidikan kewarganegaraan yang berwawasan global dapat menjadikan generasi muda berpikir untuk bisa menjadi salah satu bagian dari warga negara global yang di situ diberikan pengetahuan, ketrampilan dan karakter warga

⁵ John J Cogan, “Developing the Civic Society: The Role of Civic Education,” *Bandung: CICED* (1999).

negara global yang penuh tanggung jawab. Hal ini sebagaimana disampaikan Osler dan Starkey⁶ bahwa pendidikan kewarga negaraan mencerminkan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan peserta didik siap untuk mengambil peran sebagai warga global dewasa dan bertanggung jawab. Sekaitan dengan hal tersebut Dill, Jeffrey S⁷ juga menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarga negaraan Global merupakan salah satu bentuk reformasi pendidikan yang tercepat di era sekarang. Ia dianggap sebagai mata pelajaran yang mampu menyiapkan warga negara global agar bisa memahami berbagai permasalahan global. Melalui Pendidikan Kewarga negaraan diharapkan dapat membentuk kepribadian utama warga negara muda yang cerdas, baik serta handal. Untuk membentuk warga negara global yang cerdas, baik dan dapat handal maka harus memiliki dua sifat yaitu sikap yang peduli terhadap kondisi masyarakat serta sikap untuk melakukan perubahan lebih baik. Sikap peduli yang dimaksud itu adalah bagaimana bisa mengembangkan kemampuan untuk peduli yang tidak hanya pada lingkungan masyarakat namun lebih ditekankan pada konteks masyarakat global. Sikap untuk bisa melakukan perubahan itu merupakan yang harus dilakukan dalam menuju kebaikan di lingkungan masyarakat bangsa maupun secara global karena dengan perubahan ini akan menjadi tolak ukur kemajuan perkembangan bangsa dan negara di dunia⁸.

Untuk menyiapkan warga negara yang siap menjadi salah satu bagian dari warga negara global tentu diperlukan upaya dan langkah-langkah strategis agar tercapai target tujuan pendidikan global yang berorientasi pada adanya kesamaan untuk melaksanakan tugas, hak, kewajiban warga negara global. Sangat dibutuhkan adanya pemahaman lebih mendasar tentang pentingnya gagasan pendidikan kewarga negaraan global disertai peran pendidikan kewarga negaraan untuk membangun warga negara yang mempunyai kemampuan saling menghormati dan toleran, disertai mempunyai nilai-nilai dasar berkehidupan berbangsa dan benegara secara global.

Sebagai sumber referensi dalam konteks Negara Kanada misalnya, Joel Westheimer dan Joe Kahne⁹ mengidentifikasi tentang tiga visi tentang warga negara dewasa yang baik sebagai pijakan Pendidikan Kewarga negaraan yang dimaksudkan memandu warga negara untuk: (1) bertanggungjawab secara pribadi; (2) berpartisipasi; dan (3) berorientasi keadilan. *Visi pertama*, mengembangkan karakter warga negara agar bertanggungjawab secara personal dengan melakukan penekanan terhadap kejujuran, integritas, kedisiplinan, serta kerja keras. *Visi kedua*, mendorong warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam persoalan kewarga negaraan serta dalam kehidupan sosial pada tingkat lokal, provinsi, serta nasional. *Visi ketiga*, mewujudkan warga negara ideal melalui penggunaan perspektif keadilan dalam menilai secara kritis struktur sosial, politik, dan ekonomi serta mengeksplorasi berbagai strategi perubahan yang mengarah pada akar penyebab masalah (lihat Tabel 1).

⁶ Lorna Bourke, Philip Bamber, and Minna Lyons, "Global Citizens: Who Are They?," *Education, Citizenship and Social Justice* 7, no. 2 (2012): 161–174.

⁷ Jeffrey S. Dill, "The Moral Education of Global Citizens," *Society* 49, no. 6 (December 18, 2012): 541–546, <http://link.springer.com/10.1007/s12115-012-9599-8>.

⁸ Thomas Lickona, *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar Dan Baik* (Bandung: Nusa Media, 2013).

⁹ J Westheimer, *Citizenship Education for a Democratic Society* (Ottawa: Canadian Heritage, n.d.).

Tabel 1. Visi Warga negara Dewasa yang Baik

Tanggungjawab Personal	Partisipasi	Orientasi Keadilan
<ul style="list-style-type: none"> • Bertindak dengan penuh bertanggungjawab dalam masyarakat • Bekerja serta membayar pajak • Mengelola sampah, melakukan daur-ulang, serta donor darah • Membantu sesama, memberikan pertolongan di saat krisis • Taat hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami arti pentingnya partisipasi • Mengorganisir berbagai usaha sosial kemasyarakatan, memajukan pertumbuhan ekonomi, menjaga dan memelihara lingkungan hidup • Mengetahui fungsi dan tugas badan-badan pemerintahan • Mengetahui strategi dalam mengerjakan tugas-tugas kolektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai dan memahami secara kritis terhadap struktur sosial, politik, serta ekonomi • Mengeksplorasi berbagai strategi perubahan yang diarahkan terhadap akar penyebab masalah • Memahami gerakan sosial dan dampak perubahan sistemik • Mencari tahu serta memperhatikan berbagai bidang penyebab ketidakadilan.

Selain Joel Westheimer dan Joe Kahne sebagaimana dijelaskan di atas, John Webster Gastil¹⁰ dalam penelitian doktoralnya di University of Wisconsin—Madison (1994) menyimpulkan bahwa Kewarga negaraan Demokratis megandung tiga ethos, yakni: (1) keputusan politik; (2) komunikasi politik; serta (3) tindakan politik. Keputusan politik adalah sikap demokratis setiap warga negara yang mempunyai inisiatif, menghormati sesama warga negara, komitmen serta rasa tanggungjawab, dan kesediaan untuk berbagi dan membantu orang lain. Komunikasi politik mengungkapkan perilaku demokratis seorang warga negara yang rutin terlibat dalam percaturan politik dan musyawarah dengan sesama warga untuk memperluas wawasan penilaian secara tepat, empatik, serta reflektif. Tindakan politik mengarah pada keterlibatan unsur warga negara dalam suatu konflik –di luar ranah wacana— di dunia politik; berupa aksi voting, lobi-lobi, serta demonstrasi.

Konsepsi kewarga negaraan yang demokratis, dengan demikian mengacu kepada teori demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif ini mengarah pada proses pengambilan keputusan yang inklusif dengan memberikan kesempatan bagi para warga negara untuk membangun agenda politik sehingga dapat mencapai keputusan politik yang lebih bermakna. Pada dasarnya, proses demokrasi ideal sangat membutuhkan warga negara yang mengambil keputusan politik, saling berkomunikasi diantara mereka, serta terlibat pada aksi politik yang berlangsung secara individual serta berkelompok.

Gagasan Pendidikan Kewarga negaraan

Pendidikan kewarga negaraan berisikan materi pelajaran yang menjadi tujuan utama dalam mengembangkan sikap dan keterampilan warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban

¹⁰ John Webster Gastil, “DEMOCRATIC CITIZENSHIP &” (University of Wisconsin-Madison, 1994).

sebagai warga negara¹¹. Warga negara yang memiliki karakter cerdas, terampil serta berkarakter. Hal ini terkait dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Terkait hal ini Sumantri¹² mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarga negaraan dirumuskan dan merupakan suatu seleksi serta adaptasi dari lintas disiplin ilmu sosial, kewarga negaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan serta disajikan secara psikologis dan ilmiah dalam rangka turut mencapai salah satu tujuan pendidikan. Seperti juga disampaikan oleh Sutrisno¹³ bahwa Pendidikan Kewarga negaraan sebagai bentuk pendidikan yang berfungsi membangun kesadaran warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka upaya membentuk identitas sebagai warga negara bagi suatu bangsa.

Pendidikan kewarga negaraan berupaya membentuk warga negara yang cerdas dan baik sebagai warga negara hal ini sebagaimana di jelaskan David Kerr dalam Winarno¹⁴ *Citizenship education* dalam arti luas ialah “*proces to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizen and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that prepatory process.*” Dalam pengertian tersebut dikatakan bahwa Pendidikan Kewarga negaraan memiliki arti khusus sebagai proses pendidikan yang diwujudkan guna menyiapkan generasi mudanya akan hak-hak, peran maupun tanggungjawabnya sebagai warga negara. Dalam kajian sosial pendidikan kewarga negaraan merupakan salah satu bidang keilmuan yang bersifat multidimensional, hal ini ditinjau dari tinjauan pedagogik, menyatakan bahwa pendidikan kewarga negaraan meliputi program kurikuler dan aktivitas sosial kultural. Dengan demikian pada aspek multidimensional pendidikan kewarga negaraan dapat disikapi sebagai suatu model pendidikan nilai serta moral, kemasyarakatan, kebangsaan, politik, hukum, dan pendidikan demokrasi.

Konsep warga negara global tentu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan kewarga negaraan hal ini mengingat bahwa muatan nilai-nilai dasar warga negara global ada dan dikembangkan dalam pendidikan kewarga negaraan. Dengan demikian gagasan warga negara global menjadi tujuan utama dalam pendidikan kewarga negaraan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar warga negara dunia yang dijalankan melalui peran akan pelaksanaan akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dunia.

Adanya konsep warga negara global tentu tidak bisa dipisahkan dengan adanya arus globalisasi yang berkembang saat ini. Persamaan hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara yang tidak di batasi oleh wilayah teritorial negara merupakan konsep dasar warga negara global¹⁵. Beragam fenomena masalah global terkait warga negara menuntut suatu penyelesaian secara bersama yang diatur melalui peraturan hukum yang jelas atas dasar persamaan sebagai bagian warga dunia. Bentuk kerjasama global dengan

¹¹ Sutrisno, “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga,” *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2018): 41–51.

¹² Sumantri, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

¹³ S. Sutrisno and Mukhamad Murdiono, “Pengembangan Modul Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas,” *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 4, no. 1 (October 16, 2017): 55, <https://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/article/view/9789>.

¹⁴ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi Dan Penilaian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

¹⁵ Mark Gerzon, *American Citizen, Global Citizen* (Spirit Scope LLC, 2010).

berpartisipasi warga negara merupakan contoh positif warga negara dalam usaha membangun tatanan dunia Internasional yang lebih baik. Warga negara dalam perspektif global harus selalu menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, kepedulian dalam bentuk kesatuan masyarakat global.

Warga negara global memiliki peran penting dalam menjadikan seluruh bangsa-bangsa di berbagai negara memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam membangun dunia yang lebih baik. Rasa persatuan muncul dengan adanya berbagai permasalahan global. Hater¹⁶ menyatakan bahwa tingkat persatuan dan kesatuan berbagai bangsa dapat terbentuk manakala ada permasalahan yang mencakup kepentingan umum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara global yang pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat untuk mendeklarasikan diri sebagai bagian warga negara global sebagai kekuatan untuk meningkatkan kepentingan secara global.

Pendidikan kewarga negaraan global pada dasarnya memiliki tujuan sangat baik untuk menciptakan persamaan persepsi akan tugas, hak dan kewajiban seseorang dalam menjalankan tugas menjadi warga negara yang baik dan tidak membedakan adanya persamaan ras, suku, budaya, agama maupun kelompok. Dengan demikian tidak adanya perbedaan antara warga negara satu dengan warga negara yang lain. Pembedanya hanya terletak pada hak dasar yang melekat pada negara dimana dia tinggal. Hal ini inilah secara umum disebut dengan kesamaan hak antar seluruh umat manusia. Sebagaimana dijelaskan Linklater, A bahwa pendidikan kewarga negaraan global akan lebih bermakna bila hak dan kewajiban warga negara secara global dapat disatukan dalam bentuk hukum yang diatur secara Internasional. Dengan catatan setiap warga negara mampu memiliki persamaan rasa persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan dan menjaga kestabilan internasional secara bersama dan tidak membedakan¹⁷.

Gagasan tentang kewarga negaraan global merupakan satu alternatif untuk menyatukan persepsi terhadap penyelesaian berbagai permasalahan Internasional baik dari aspek ekonomi, politik, kesehatan, bahkan lingkungan hidup yang pada kenyataannya secara terus menerus mengancam kestabilan internasional di berbagai Negara di belahan dunia. Warga negara global dituntut untuk mampu berpartisipasi aktif. Konsep nilai-nilai dasar dalam perkembangan sosial kebudayaan suatu negara tidak dapat hilang dikarenakan bentuk persamaan persepsi sebagai salah satu bagian warga negara global. Persepsi tentang persamaan warga negara global menjadi acuan bagi setiap warga negara agar dapat berkontribusi dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan yang diatur berdasarkan konsep perikemusiaan yang adil dan beradab.

Persepsi mengenai warga negara global dalam konsep pendidikan kewarga negaraan menjadi pedoman untuk dapat berpartisipasi menyelesaikan berbagai permasalahan global. Model partisipasi seperti hal tersebut yang menjadi acuan dalam pendidikan kewarga negaraan diberbagai negara. Melalui pendidikan kewarga negaraan global diharapkan mampu membentuk warga negara yang siap diri untuk mampu berpartisipasi aktif dan berkerjasama dalam membangun dan menata kehidupan dunia Internasional yang selalu dilandaskan pada nilai-nilai nasionalisme. Sebagaimana diungkapkan oleh Cogan¹⁸ bahwa Pendidikan kewarga negaraan global mempunyai beberapa

¹⁶ A Hater, *Brief History of Citizenship* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004).

¹⁷ Engin F Isin and Bryan S Turner, *Handbook of Citizenship Studies* (Sage, 2002).

¹⁸ Cogan, "Developing the Civic Society: The Role of Civic Education."

komponen pokok yakni “the enjoyment of certain rights: the fulfilment of corresponding obligations: a degree of interest and involvement in public affairs and an acceptance of basic societal value”. Komponen ini menjadi dasar kepribadian bangsa untuk membentuk warga negara global yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai nasionalisme negara serta menjunjung tinggi adanya persatuan dan kesatuan warga negara secara global dalam rangka membangun kehidupan internasional yang berkemajuan.

Pendidikan Kewarga negaraan umumnya memberikan kontribusi yang besar bagi penyelesaian berbagai permasalahan global. Pada dasarnya setiap individu akan selalu berhubungan satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya seseorang dipahami sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain. Demikian juga konsep warga negara bangsa, setiap negara mempunyai permasalahan secara kompleks tentang negara dan bangsa, yang tentunya dalam hal ini membutuhkan bantuan dan kerjasama dari bangsa serta negara lain di dunia. Konsepsi Pendidikan Kewarga negaraan ini muncul untuk memberikan pengalaman dan pendidikan bagi warga negara di berbagai negara untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan global dan mampu bekerjasama untuk membangun warga negara global melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarga negaraan baik dalam lingkup formal, nonformal maupun informal.

Pendidikan Kewarga negaraan dalam perspektif umum memberi kontribusi untuk membina dan mengembangkan karakter seorang warga negara yang cerdas. Hal itu tentunya sudah menjadi bagian dari ide, instrumentasi serta praksis dalam pendidikan di Indonesia. Dijelaskan oleh Winataputra¹⁹ bahwa keberadaan pendidikan kewarga negaraan sudah terwujud dalam lima status yaitu; *pertama*, sebagai mata pelajaran yang dikembangkan serta ada pada kurikulum sekolah/madrasah. *Kedua*, Pendidikan Kewarga negaraan masuk ke dalam ranah program mata kuliah wajib (MKU) pada kurikulum perguruan tinggi. *Ketiga*, masuk pada ranah disiplin ilmu sosial dalam kerangka program pendidikan guru yang dibina dan dikembangkan oleh program studi. *Keempat*, Pendidikan Kewarga negaraan masuk pada ranah pendidikan politik yang dikemas melalui penataran P4 di era tahun 1970-1990-an ataupun sejenisnya yang dikelola dan dikembangkan serta diatur oleh Pemerintah. *Kelima*, Pendidikan Kewarga negaraan sebagai kerangka konseptual, dalam bentuk pemikiran individual atau kelompok pakar yang terkait dan dikembangkan sebagai landasan serta kerangka berpikir tentang pendidikan kewarga negaraan.

Pendidikan kewarga negaraan merupakan pendidikan yang mampu mengarahkan pembentukan watak para peserta didik untuk memiliki kesadaran sebagai salah satu warga negara global. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi pilihan untuk melatih sikap, pengetahuan dan keterampilan warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan, konflik, dan isu global yang terjadi melalui pola pembelajaran yang diimplementasikan. Terkait dengan hal itu Jeffrey S Dill²⁰, menjelaskan bahwa *Global Civic Education* merupakan bentuk reformasi pendidikan yang paling cepat di era dewasa ini. Pendidikan Kewarga negaraan global dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu menyiapkan warga negara global untuk

¹⁹ U S Winataputra, *Pendidikan Kewarganegaraan Refleksi Historis Epistimologi Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan* (Banten: Universitas Terbuka, 2015).

²⁰ Dill, “The Moral Education of Global Citizens.”

dapat memahami berbagai permasalahan global. Pendidikan Kewarga negaraan diharapkan dapat membentuk kepribadian utama seorang warga negara yang cerdas, baik dan dapat handal.

Untuk membentuk warga negara global yang cerdas, baik dan handal, maka minimal harus memiliki dua sifat yakni sikap yang peduli terhadap kondisi masyarakat dan sikap yang dapat melakukan perubahan yang lebih baik. Sikap peduli dimaksud itu adalah bagaimana dapat mengembangkan kemampuan kepedulian tidak hanya di lingkungan masyarakat, akan tetapi lebih menekankan konteks masyarakat global. Sikap untuk mampu melakukan perubahan ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menuju kebaikan, baik di lingkungan masyarakat bangsa maupun masyarakat secara global. Melalui perubahan ini akan menjadikan tolak ukur majunya perkembangan bangsa dan negara di dunia²¹. Tentu sikap seperti itu dapat dibentuk melalui proses pendidikan dan pembelajaran khususnya terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Proses pembelajaran Pendidikan Kewarga negaraan dapat menggunakan berbagai model pendekatan, strategi, media, dan sumber belajar yang dapat mengajarkan pada peserta didik, terkkhusus pada tarap kemampuan pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang rasa kepedulian antar umat manusia di dunia sebagai salah satu bagian dari warga negara global.

Harapan terhadap Pendidikan Kewarga negaraan ini supaya mampu membangun warga negara global yang memiliki kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat global maka terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan. *Pertama*, Pendidik harus bisa meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan serta keterampilan para peserta didik secara universal. Sebagaimana dijelaskan oleh Dill, Jeffery²² bahwa pendidik/guru di abad ke-21 sedang berusaha untuk membuat peserta didiknya masuk dalam warga negara global. Adapun kemampuan tersebut di atas dapat diterapkan melalui pengembangan kompetensi peserta didik tentang kesadaran hidup dalam dunia yang dianggap lebih adil, toleran dan damai. Kompetensi sebagaimana diungkapkan Richard Remy²³ yang dikembangkan melalui beberapa prosedur yang meliputi, “1) Memperoleh dan menggunakan, 2) Menilai dan melibatkan diri, 3) Membuat keputusan, 4) Membuat penilaian, 5) komunikasi 6) bekerjasama 7) Peminatan”.

Peran kedua adalah penguatan nilai komitmen moral dan empati diluar kepentingan individu dan kelompok. Penguatan nilai moral dan empati diluar kepentingan personal dan kelompok ini merupakan kunci penting dalam pandangan konsep warga negara global. Maksudnya adalah warga negara dituntut untuk meminimalisir munculnya kepentingan individu atau kelompok di atas kepentingan umum. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya pemahaman yang secara umum bagi warga negara khususnya generasi muda pada jenjang pendidikan kewarga negaraan untuk dapat meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan warga negara yang menurut Merryfield²⁴ meliputi 1) menjunjung tinggi nilai keberagamaan pada setiap proses pembelajaran, 2) menumbuhkan persepsi tentang pentingnya ikatan sosial antar masyarakat yaitu dunia merupakan satu kesatuan yang saling berketergantungan dan terikat antar satu sama lain, 3) hubungan antar sesama manusia yang selalu dipengaruhi hubungan dan organisasi global.

²¹ Lickona, *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar Dan Baik*.

²² Dill, “The Moral Education of Global Citizens.”

²³ Sapriya and A A Wahab, *Teori Dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2011).

²⁴ Surya Dharma, “Teori Sosial Dan Kewarganegaraan” (Bandung: Widya Aksara Press, 2016).

Peran-peran di atas tentu harus ditopang melalui mekanisme dan proses pembelajaran yang terintegrasi. Integrasi tersebut dapat diterapkan melalui konsep pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran dan model pembelajaran. Ketiga konsep integrasi pembelajaran tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk pendidikan otentik. Pendidikan otentik dimaksud merupakan bentuk pendidikan yang mengimplementasikan psikologi humanistik yang lebih menekankan pada pendidikan untuk membangun individu manusia seutuhnya. Pendidikan otentik menurut Gulikers, Bastiaen, Kirchner²⁵ dijelaskan bahwa “*authentic education*” yakni menempatkan konsep *authentic learning, authentic instruction, and authentic assessment* dalam paradigma pendidikan otentik”. Pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran keterhubungan antara pembelajaran, proses belajar serta penilaian hasil belajar secara utuh.

Pendidikan Kewarga negara menjadi bagian penting untuk menyiapkan warga negara global yang terus berkembang. Warga negara global mempunyai beberapa karakteristik yang harus tampak, dan harus disiapkan dalam setiap proses pembelajaran Pendidikan Kewarga negara. Karakteristik itu menurut John C. Cogan²⁶, terdiri beberapa kemampuan yaitu 1) Kemampuan mengenal dan memecahkan masalah sebagai warga masyarakat global, 2) Kemampuan bekerjasama dengan orang lain serta memikul tanggung jawab atas perannya dalam masyarakat, 3) Kemampuan memahami, menerima, dan menghormati berbagai perbedaan budaya, 4) Kemampuan berpikir kritis, dan sistematis 5) Kemampuan menyelesaikan konflik dengan damai tanpa kekerasan, 6) Kemampuan merubah gaya hidup serta pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan, 7) Kemampuan dalam kepekaan serta mampu mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum perempuan, minoritas etnis, dll), 8) Kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik baik di tingkat pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

Karakteristik warga negara global itu yang perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dalam setiap proses pembelajaran Pendidikan Kewarga negara di setiap jenjang pendidikan, sehingga mampu menyiapkan calon warga negara global yang dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan beragam permasalahan, konflik dan isu global secara bersama sebagai salah satu kewajiban warga negara. Dengan demikian akan terciptanya tatanan kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta makmur dalam lingkup masyarakat global.

Hakikat Warga Negara Global (Global Citizenry)

Globalisasi saat ini sudah jelas mempengaruhi perkembangan yang sangat signifikan di berbagai bidang kehidupan manusia. Globalisasi dapat dimaknai dengan beragam pemahaman tergantung dari sudut pandang apa dalam memahaminya. Berbagai perdebatan yang membahas tentang berbagai dampak globalisasi khususnya di negara berkembang. Adanya globalisasi akan menjadikan suatu negara justru menjadi negara yang kaya semakin kaya, atau sebaliknya mendorong negara yang miskin terbelakang akan semakin miskin dan terbelakang dalam menghadapi era globalisasi.

²⁵ Winataputra, *Pendidikan Kewarganegaraan Refleksi Historis Epistemologi Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*.

²⁶ Cogan, “Developing the Civic Society: The Role of Civic Education.”

Adanya globalisasi juga berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial kemasyarakatan dalam globalisasi terikat oleh tiga dimensi globalisasi yakni ekonomi, politik dan budaya. Globalisasi ekonomi berdampak terhadap adanya perkembangan berbagai kondisi pasar ekonomi global, perdagangan bebas, pertukaran barang dan jasa. Globalisasi politik memiliki pengaruh pada globalisasi dunia yakni munculnya dominasi peran organisasi internasional dalam mengatur negara di bawah kendali PBB dan Uni Eropa yang berakibat munculnya politik Global. Globalisasi budaya merupakan perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan dalam ranah teknologi informasi secara global. Model globalisasi inilah menjadi konsepsi pemahaman tentang warga negara global²⁷.

Konsep warga negara global ini jelaslah bukan hal baru. Kemunculannya sudah sejak zaman Yunani kuno tepatnya pada abad ke 4 SM. Munculnya konsepsi mengenai warga negara dunia ini bermula dari ketidakterimaan akan kesetiaan publik warga negara yang dikemukakan oleh salah satu filsuf Diogenes. Kemudian Linklater²⁸ menyebutkan adanya gagasan tersebut yang menjadi rujukan untuk mengkritisi negara terkait adanya bentuk kedaulatan secara universal/global dengan tujuan dapat mewujudkan kehidupan warga negara dunia yang adil, dan makmur serta damai.

Secara umum warga negara global dapat diartikan tanggungjawab warga negara untuk memenuhi persyaratan institusional dan budaya demi kebaikan yang lebih luas bagi masyarakat global. Beth salah seorang guru Ilmu Sosial Hickory High School²⁹ menjelaskan bahwa warga negara global adalah individu yang berakar dalam identitas kebangsaannya, tetapi mereka memiliki kesadaran yang lebih besar dengan cara menghargai berbagai keberagaman budaya, sikap toleran terhadap keyakinan individu lain serta melihat berbagai isu global sebagai kajian utama daripada batasan-batasan bangsanya sendiri.

Warga negara global menitikberatkan pada peran warga negara global dalam menjalankan hak kewajiban secara global. Konsep warga negara global cenderung mengembangkan istilah dengan kewarga negaraan global yang menurut Bringham³⁰ dinyatakan bahwa, "*global citizenship is a way of understanding - how the world works, links between our own lives and those of people throughout the world*". Kewarga negaraan global mengkaji tentang peran dan tanggungjawab manusia dalam memaknai, melihat dan bertindak dalam kondisi dunia kerja, serta hubungan antar kehidupan manusia secara personal dan warga negara dunia.

Perkembangan warga negara global terdapat berbagai kritik dari beberapa pihak, selain ada yang mendukung tentang konsep tersebut. Michael Walzer menjelaskan bahwa memahami makna warga negara global harus pula mengerti tentang apa warga negara bangsa dan warga negara global. Warga negara global tidak dapat dipahami sebagai warga negara global dikarenakan ada kebutuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara bangsa. Oleh sebab itu konsepsi mengenai warga negara dunia harus diperhitungkan secara matang karena bila tidak maka hal ini justru akan menjadi alat politik yang dibalut dengan makna secara univiersal. Kondisi ini harus

²⁷ Malcolm Waters, *Globalization, London and New York* (London: Routledge, 1995).

²⁸ Isin and Turner, *Handbook of Citizenship Studies*.

²⁹ Dill, "The Moral Education of Global Citizens."

³⁰ Shahla Zahabioun et al., "Global Citizenship Education and Its Implications for Curriculum Goals at the Age of Globalization," *International Education Studies* 6, no. 1 (December 11, 2012), <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/23019>.

dapat disikapi dengan bijak bahwa konsepsi warga negara dunia akan dijadikan sebagai sarana kepentingan politik untuk penjajahan budaya terhadap bangsa lain atau malah justru dapat digunakan sebagai *trend* gerakan secara universal bangsa-bangsa untuk mengembangkan bentuk solidaritas sosial antar masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dunia di era global agar terwujudnya kehidupan dunia yang adil dan damai. Salah satu komponen dari warga negara bangsa secara umum individu harus dapat menempatkan posisi pada tataran kapan menjadi warga negara bangsa dan kapan warga negara global. Tentu hal ini tidak semata sebagai wujud dari paham menegnai warga negara global akan tetapi hal yang lebih penting yaitu dapat menjadi warga negara yang mempunyai perspektif global untuk dapat bersama menyelesaikan permasalahan isu global dan juga konflik yang terjadi³¹.

Dibutuhkan persiapan sejak dini agar persepsi di atas dapat ditransformasikan melalui pendidikan yang berkelanjutan pada jenjang sekolah/madrasah baik formal maupun non formal. Hal ini dapat dilakukan terhadap peserta didik dalam setiap tahap pembelajaran di kelas maupun luar kelas. Mata pelajaran yang dapat menumbuhkembangkan pemahaman dan kemampuan untuk dapat berpartisipasi dalam permasalahan global adalah Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*).

Identitas nasional suatu bangsa menjadi sangat penting, di saat globalisasi tengah melanda negara bangsa. Bangsa yang tidak punya kemampuan dalam mempertahankan jatidirinya akan terombang ambing akibat deras arus globalisasi yang berdampak pada krisis jati diri bangsa atau identitas nasionalnya.

Globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari, karena pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa proses kemunculan dan pengintegrasian ekonomi dengan hegemoni kapitalis. Perdagangan bebas untuk barang dan jasa yang merupakan semangat globalisasi, kebebasan sirkulasi kapital, serta kebebasan berinvestasi, kemudian merambah kepada bidang-bidang kehidupan lain sehingga globalisasi menjadi suatu proses transformasi mendunia yang semakin nyata diberbagai bidang baik terkait ideologi, politik, budaya, dan ekonomi.

Beriringan dengan besarnya gelombang kebebasan sejak era reformasi, bangsa Indonesia tidak dapat lepas dari berbagai pengaruh dari luar, termasuk di bidang ideologi, politik, budaya, ekonomi, yang dapat diadopsi begitu saja oleh para elit politik. Hal ini nampak dari cara berpikir dan bertindak yang cenderung mengadopsi apa saja yang datang dari luar dengan maksud untuk menyelesaikan persoalan krisis multidimensi yang tengah melanda bangsa Indonesia. Kenyataannya hal itu malah menimbulkan persoalan baru yang makin kompleks. Radikalisme agama, makin pudarnya nilai-nilai toleransi, serta semangat gotong royong. Selain itu makin menguatnya isu etnisitas yang berbau SARA, kesenjangan sosial ekonomi, makin lunturnya nilai-nilai dan semangat Pancasila di dada generasi muda³², dan yang paling mengkhawatirkan adalah isu radikalisme yang menyeret pelajar dan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.

Berbagai macam persoalan yang tengah melilit bangsa sekarang, bila dicermati secara mendalam, nampak bahwa akar permasalahannya ada pada kondisi makin pudarnya nilai-nilai

³¹ Sapriya and Wahab, *Teori Dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*.

³² M Hafil, "Nilai Pancasila Memudar Di Kalangan Muda," *Republika Online* (Jakarta, 2014), <https://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/06/nd0jkb24-nilai-pancasila-memudar-di-kalangan-muda>.

Pancasila sebagai identitas nasional terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini bila tidak ditemukan solusi terhadap problematika itu dimana makin memudarnya penghayatan nilai-nilai Pancasila, maka secara perlahan stabilitas negara Indonesia akan terganggu bahkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Sri Edi Swasono³³, mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memerlukan pegangan identitas nasional, yakni Pancasila. Sebagian dari kita menegaskan bahwa disamping merupakan nilai-nilai budaya, identitas bangsa, filsafat negara, ideologi nasional, kehadiran Pancasila merupakan *platform* nasional dengan penuh toleransi dapat diterima semua agama sebagai bagian konsensus nasional. Pancasila merupakan paham persatuan sekaligus juga kebijakan nasional dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan *platform* itu, persatuan bukanlah sekedar persatuan. Tanpa *platform* nasional, bangsa Indonesia akan mudah terombang ambing tanpa pegangan, dilanda kebingungan, tanpa pedoman arah dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa yang disepakati sejak proklamasi kemerdekaan 1945.

Muhammad Noor Syam³⁴ mengungkapkan bahwa ajaran dan nilai filosofis sangat berpengaruh terhadap pikiran, budaya, peradaban, dan moral umat manusia. Sistem tata negara ditegakkan berdasar ajaran atau filosofi yang dianut sebagai dasar dan ideologi Negara. Di berbagai negara modern selalu mempromosikan keunggulan mereka, dan terus memperjuangkan supremasi ideologi serta dominasi sistem kenegaraannya. Baik itu berbentuk teokratisme, liberalisme, kapitalisme, marxisme, komunisme-atheisme dan lainnya. Bangsa Indonesia menegakkan sistem kenegaraan Pancasila, dan UUD Proklamasi 1945 sebagai aktualisasi filosofi hidup yang diamanatkan oleh para pendiri negara.

Ketika mendengar istilah kewarga negaraan, secara tidak langsung respon dan dikaitkan dengan pembelajaran kewarga negaraan pada saat di sekolah atau madrasah, serta mata kuliah kewarga negaraan di perguruan tinggi. Pendidikan Kewarga negaraan pada awalnya digabung menjadi satu, karena substansi Pendidikan Kewarga negaraan sendiri bersumber dari Pancasila. Selanjutnya Pendidikan Kewarga negaraan dianggap penting untuk dipelajari oleh siswa. Pendidikan Kewarga negaraan diajarkan materi kewarga negaraan yang lebih luas dan tidak semata-mata bersumber langsung dari Pancasila. Mengkaji dan mempelajari Pendidikan Kewarga negaraan beberapa materinya memang berkaitan ataupun sama. Itulah dalam beberapa aspek Pendidikan kewarga negaraan kurang mendapat perhatian serius di percaturan dunia pendidikan. Menurut sebagian orang, lebih penting mempelajari matematika dibanding PKn.

Tujuan utama Pendidikan Kewarga negaraan adalah mewujudkan warga negara yang sadar belanegara didasarkan pada pemahaman politik kebangsaan, kepekaan mengembangkan jati diri serta moral berbangsa. Siswa atau mahasiswa merupakan bibit unggul bangsa yang pada masanya bibit ini akan mencetak generasi pemimpin dunia. Oleh karena itulah dibutuhkan pendidikan moral dan akademis yang akan membentuk dan mentransformasikan nilai-nilai yang berguna. Kepribadian seseorang anak didik akan tumbuh dan berkembang seiring waktu dan mengalami proses pbenahan, pembekalan, dan penentuan, yang pada akhirnya pemutusan prinsip diri pada seseorang. Negara, dan masyarakat masa depan, diperlukan ilmu dan wawasan kepribadian yang

³³ S E Swasono, "Pancasila Dan Nasionalisme Kampus," *Kompas*, 2011, <https://nasional.kompas.com/read/2011/06/03/0411061/Pancasila.dan.Nasionalisme.Kampus?page=all>.

³⁴ T Adhitama, "Menjaga Etika Bermasyarakat," *Gagasan Hukum*, last modified 2010, accessed April 20, 2018, <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/10/04/menjaga-etika-bermasyarakat/>.

cukup untuk dapat mendukung kokohnya pendirian suatu bangsa. Negara yang sedang melangkah maju membutuhkan daya dukung yang besar dari masyarakat, memerlukan tenaga kerja yang berkualitas, disertai semangat dan loyalitas tinggi.

Negara didorong untuk menggugah warga negaranya supaya dapat tercipta rasa persatuan kesatuan dan rasa turut memiliki. Masyarakat perlu disadarkan untuk segera mengabdikan diri kepada negara, bersatu padu untuk menghadapi berbagai krisis budaya, kepercayaan, nilai moral dan lainnya. Negara harus dapat membentuk imej di masyarakat agar muncul rasa bangga dan keinginan serta semangat melindungi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan kewarga negaraan menjadi salah satu sarana tepat untuk memberikan gambaran secara langsung terkait hal-hal yang bersangkutan mengenai kewarga negaraan pada siswa atau anak didik. Pendidikan kewarga negaraan menjadi sangat penting dan utama. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pendidikan kewarga negaraan harus berisi nilai-nilai pluralisme yakni sikap menghargai keragaman, kolaboratif, serta kreatifitas. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kewarga negaraan dalam kerangka menumbuhkembangkan identitas nasional.

Kesimpulan

Pendidikan kewarga negaraan pada hakikatnya merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan bangsa dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan implementasi hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata Negara, menumbuhkembangkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa dan moral bangsa, maka tidaklah akan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan serja kejayaan bangsa Indonesia.

Melalui Pendidikan Kewarga negaraan diajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kewarga negaraan tidak dapat diwariskan begitu saja melainkan perlunya dipelajari dan dialami oleh masing-masing individu. Demikian pula halnya negara Indonesia yang sedang menuju menjadi negara demokratis, secara tidak langsung warga negaranya perlu lebih aktif dan partisipatif. Sebagai peserta didik dan mahasiswa harus mempelajarinya, agar dapat menjadi garda depan dalam upaya melindungi negara. Gardia depan yang kokoh dan akan terus dan terus melindungi Negara.

Pendidikan Kewarga negaraan mengajarkan bagaimana warga negara tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negaranya, akan tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara harus toleran serta mandiri. Pendidikan ini mendorong setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, wawasan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan cakupan lebih luas juga tercakup dalam Pendidikan Kewarga negaraan. Meskipun pengembangan itu dapat dipelajari tanpa menempuh Pendidikan Kewarga negaran, akan lebih Pendidikan ini dapat menjadi alternatif penting yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya.

Daftar Pustaka

Adhitama, T. "Menjaga Etika Bermasyarakat." *Gagasan Hukum*. Last modified 2010. Accessed April 20, 2018. <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/10/04/menjaga-etika-bermasyarakat/>.

- Asyafiq, Sutrisno. "Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen Di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (October 31, 2017): 166. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/15664>.
- Banks, James A. "Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age." *Journal of Education* 194, no. 3 (2014): 1–12.
- Bourke, Lorna, Philip Bamber, and Minna Lyons. "Global Citizens: Who Are They?" *Education, Citizenship and Social Justice* 7, no. 2 (2012): 161–174.
- Cogan, John J. "Developing the Civic Society: The Role of Civic Education." *Bandung: CICED* (1999).
- Dharma, Surya. "Teori Sosial Dan Kewarganegaraan." Bandung: Widya Aksara Press, 2016.
- Dill, Jeffrey S. "The Moral Education of Global Citizens." *Society* 49, no. 6 (December 18, 2012): 541–546. <http://link.springer.com/10.1007/s12115-012-9599-8>.
- Gastil, John Webster. "DEMOCRATIC CITIZENSHIP &." University of Wisconsin-Madison, 1994.
- Gerzon, Mark. *American Citizen, Global Citizen*. Spirit Scope LLC, 2010.
- Hafil, M. "Nilai Pancasila Memudar Di Kalangan Muda." *Republika Online*. Jakarta, 2014. <https://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/06/nd0jkb24-nilai-pancasila-memudar-di-kalangan-muda>.
- Hater, A. *Brief History of Citizenship*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
- Isin, Engin F, and Bryan S Turner. *Handbook of Citizenship Studies*. Sage, 2002.
- Lickona, Thomas. *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar Dan Baik*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Sapriya, and A A Wahab. *Teori Dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumantri. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Sutrisno. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2018): 41–51.
- Sutrisno, S., and Mukhamad Murdiono. "Pengembangan Modul Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas." *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 4, no. 1 (October 16, 2017): 55. <https://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/article/view/9789>.
- Swasono, S E. "Pancasila Dan Nasionalisme Kampus." *Kompas*, 2011. <https://nasional.kompas.com/read/2011/06/03/0411061/Pancasila.dan.Nasionalisme.Kampus?page=all>.
- Syaifudin, Muhammad, and Agus Satmoko Adi. "KONTRIBUSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) DALAM PEMBENTUKAN PERILAKU SISWA SMA NEGERI 19 SURABAYA." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2014): 670–684.
- Syarbaini, Syahrial. "Membangun Karakter Dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Yogyakarta: Graha Ilmu* (2006).
- Waters, Malcolm. *Globalization. London and New York*. London: Routledge, 1995.
- Westheimer, J. *Citizenship Education for a Democratic Society*. Ottawa: Canadian Heritage, n.d.
- Winarno. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi Dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Winataputra, U S. *Pendidikan Kewarganegaraan Refleksi Historis Epistimologi Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*. Banten: Universitas Terbuka, 2015.

Zahabioun, Shahla, Alireza Yousefy, Mohammad H Yarmohammadian, and Narges Keshtiaray. "Global Citizenship Education and Its Implications for Curriculum Goals at the Age of Globalization." *International Education Studies* 6, no. 1 (December 11, 2012). <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/23019>.